

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan banyak arti, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Suparlan (dalam Septiany, 2012) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Mawarto (2005), kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berbagai strategi dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tapi masih saja formulasi untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri.

Menurut *World Bank* (dalam Septiany, 2012), kemiskinan didefinisikan sesuai dengan kondisi Indonesia pada kondisi saat ini (krisis ekonomi akhir 1990-an) diperluas dengan memasukkan semua dimensi kesejahteraan manusia-kecukupan atas pangan, papan dan kenyamanan, mengurangi kerentanan terhadap benturan-benturan dari luar, akses ke dunia pendidikan, kesehatan, perawatan dan sarana-sarana dasar, serta peluang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa dibedakan dengan masyarakat lainnya.

Dari berbagai definisi umum di atas, kemiskinan dapat di kategorikan: Pertama, standar hidup yang rendah dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Kedua, kemiskinan tidak hanya mengenai standar hidup yang rendah tetapi juga masalah yang berkaitan dengan ukuran fisiologi, psikologi dan kondisi-kondisi sosial lainnya seperti: keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin, perumahan, pendidikan, kesehatan, benturan-benturan dari luar, sarana-sarana dasar serta peluang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa dibedakan dengan masyarakat lainnya.

2. Jenis-jenis Kemiskinan

2.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi

pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita” (bps.go.id, 2009).

2.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (bps.go.id, 2009).

3. Indikator Kemiskinan

Menurut Cahyono (2011), ada tiga indikator dasar kemiskinan yang digunakan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu :

- a) *Head Count Index (HCI-P0)* yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

- b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan melihat seberapa miskin orang miskin itu. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- c) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

4. Penyebab Kemiskinan

Menurut Bank Dunia Tahun 2003 (dalam Septiany, 2012), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

B. Tinjauan Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2009).

Menurut Suharto (2009), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang , khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (*a*) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (*b*) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (*c*) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai

oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2009)

2. Indikator Keberdayaan

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Indikator keberdayaan tersebut meliputi sebagai berikut: (Suharto, 2009)

- a) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan dirinya.
- c) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.

- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya.
- f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, nama anggota DPRD setempat, nama presiden, dan mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

C. Tinjauan Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *cepere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sedangkan masyarakat berasal dari bahasa inggris *society* yang artinya sekumpulan orang yang membentuk sistem semi tertutup atau sebaliknya. Jadi, partisipasi masyarakat adalah sekumpulan orang yang mengambil peranan/tugas.

Uphoff, Cohen, dan Goldsmith dalam Swedianti (2011) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pada pelaksanaan program.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan dari tahap awal sampai ke tahap akhir.

2. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Uphoff, Cohen, dan Goldsmith dalam Swedianti (2011) membagi partisipasi ke dalam beberapa jenis tahapan, yaitu:

- a) Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya.
- b) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

- c) Tahap evaluasi dan monitoring, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2003) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

- a) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
- b) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
- c) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Sutami (2009), adapun bentuk-bentuk partisipasinya meliputi:

- a) Pikiran, merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b) Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c) Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.
- d) Keahlian, merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- e) Barang, merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- f) Uang, merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 2003). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 2003).

Menurut Plumer (dalam Yulianti, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- Pengetahuan dan keahlian.

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

- Pekerjaan masyarakat.

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikit pun waktunya

untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

- Tingkat pendidikan dan buta huruf.

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

- Jenis kelamin.

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

- Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai

posisi penting guna kesuksesan program.

D. Tinjauan RIS-PNPM Mandiri

1. Definisi RIS-PNPM Mandiri

Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang dikenal dengan RIS-PNPM Mandiri, merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah payung PNPM Mandiri. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. RIS PNPM Mandiri dilaksanakan dengan beberapa penguatan dari pelaksanaan program RIS PNPM Mandiri sebelumnya. (www.pnpm-mandiri.org)

2. Tujuan RIS-PNPM Mandiri

Menurut Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri (2009), *Rural Infrastructure Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Mandiri* memiliki tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.

3. Sasaran RIS-PNPM Mandiri

Menurut Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri (2009), sasaran *Rural Infrastructure Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (RIS-PNPM) Mandiri adalah:

- 1) Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan;
- 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan;
- 3) Tersusunnya rencana PJM Pronangkis pada tataran desa;
- 4) Meningkatnya jumlah penanganan desa tertinggal sejalan dengan RPJMN 2004-2009;
- 5) Meningkatnya kemampuan aparaturnya pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan;
- 6) Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

4. Prinsip RIS-PNPM Mandiri

Menurut Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri (2009), prinsip-prinsip penyelenggaraan *Rural Infrastructure Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (RIS-PNPM) Mandiri adalah :

a. *Acceptable*

Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa (*acceptable*). Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan

solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan.

b. *Transparan*

Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

c. *Akuntabel*

Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.

d. *Berkelanjutan;*

Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur dan sarana perdesaan secara mandiri oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar dapat harmonis secara sosial, produktif secara ekonomi, dan lestari secara lingkungan.

e. *Kerangka Jangka Menengah*

Penyelenggaraan yang dilaksanakan pada kerangka jangka menengah sebagai dasar upaya peningkatan akses terhadap pelayanan infrastruktur sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dituangkan atau diwujudkan dalam PJM Pronangkis.

5. Organisasi Pelaksana

Menurut Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri (2009) pada tingkat desa, unsur utama pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri adalah :

a. Kepala Desa

Peran utama Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui RIS-PNPM Mandiri dapat tercapai dengan baik.

b. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Menyelenggarakan RIS-PNPM di tingkat desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai RKM serta membuat laporan kemajuan pembangunan perminggu dan laporan keuangan perbulan.

c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Desa (PPTD)

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pengadaan material maupun untuk penyewaan alat berat.

d. Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)

KPP adalah organisasi warga masyarakat yang terdiri dari unsur pemerintahan desa (selain Kepala Desa), perwakilan masyarakat desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat infrastruktur, dan perwakilan masyarakat setempat.

e. Kader Desa (KD)

Di masing-masing lokasi desa sasaran akan disediakan 1 (satu) tenaga Kader Desa. KD berasal dari masyarakat setempat yang mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan RIS-PNPM Mandiri sesuai dengan kriteria dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Selain itu, ada pula fasilitator masyarakat (FM) yang merupakan unsur pendampingan pelaksanaan program secara langsung di desa. Jumlah fasilitator bervariasi disesuaikan dengan jumlah desa sasaran dengan mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan dan kondisi lapangan. Fasilitator masyarakat (FM) mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan RIS-PNPM Mandiri dan penerapan prinsip-prinsip program.

6. Indikator Kinerja RIS-PNPM Mandiri

Menurut Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri (2009), kinerja pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air minum, dan memiliki pelayanan sanitasi yang memadai baik di lingkungan sarana umum (sekolah dan pelayanan kesehatan);

- b) Terbentuknya lembaga pelaksana program (OMS) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, dan mampu mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan melalui penyusunan PJM Pronangkis dan penyusunan RKM serta pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- c) Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun.

7. Indikator Keberhasilan RIS-PNPM Mandiri

Menurut Purba (2005), keberhasilan suatu proyek pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- a. Kesesuaian bentuk sarana yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari rencana yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat atau musyawarah warga masyarakat dan Fasilitator tehnik dalam menentukan sarana yang ada di desa seperti pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan panduan teknis suatu program. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui PJM Pronangkis.

- b. Kesesuaian tindakan aktor yang terlibat

Setiap aktor atau Pelaku RIS-PNPM Mandiri memiliki peran masing-masing sesuai dengan keahliannya dan mendasar pada prosedur teknis Pelaku RIS-PNPM Mandiri yang telah direncanakan bersama. Dalam hal ini Pelaku RIS-PNPM Mandiri harus memiliki fungsi masing-

masing dengan harapan bahwa kinerja suatu organisasi RIS-PNPM Mandiri dapat efektif dan efisien dalam menjalankan suatu program.

c. Memperoleh rekomendasi kebijakan/regulasi.

Hasil kebijakan harus memperoleh rekomendasi dari pihak-pihak yang membuat kebijakan seperti pemerintah. Tujuan rekomendasi kebijakan adalah untuk memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain. Dimana proses pemilihan alternatif tersebut harus mendasar pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal bahwa suatu alternatif kebijakan dipilih atau ditolak.

d. Mempermudah transportasi, menghemat biaya dan mendapatkan keuntungan serta mensejahterakan masyarakat.

Program RIS-PNPM Mandiri dalam pelaksanaannya tentunya mempunyai sasaran yang dapat dinikmati masyarakat banyak, khususnya masyarakat lokasi proyek tersebut, apabila dikelola sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang telah digariskan, sehingga apa yang diharapkan pada poin (d) tersebut terlaksana.

e. Membangun sistem monitoring untuk program pembangunan selanjutnya.

Program yang terlaksanakan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan selanjutnya. Dengan adanya sistem monitoring diharapkan hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan kedepannya. Monitoring adalah penilaian secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan

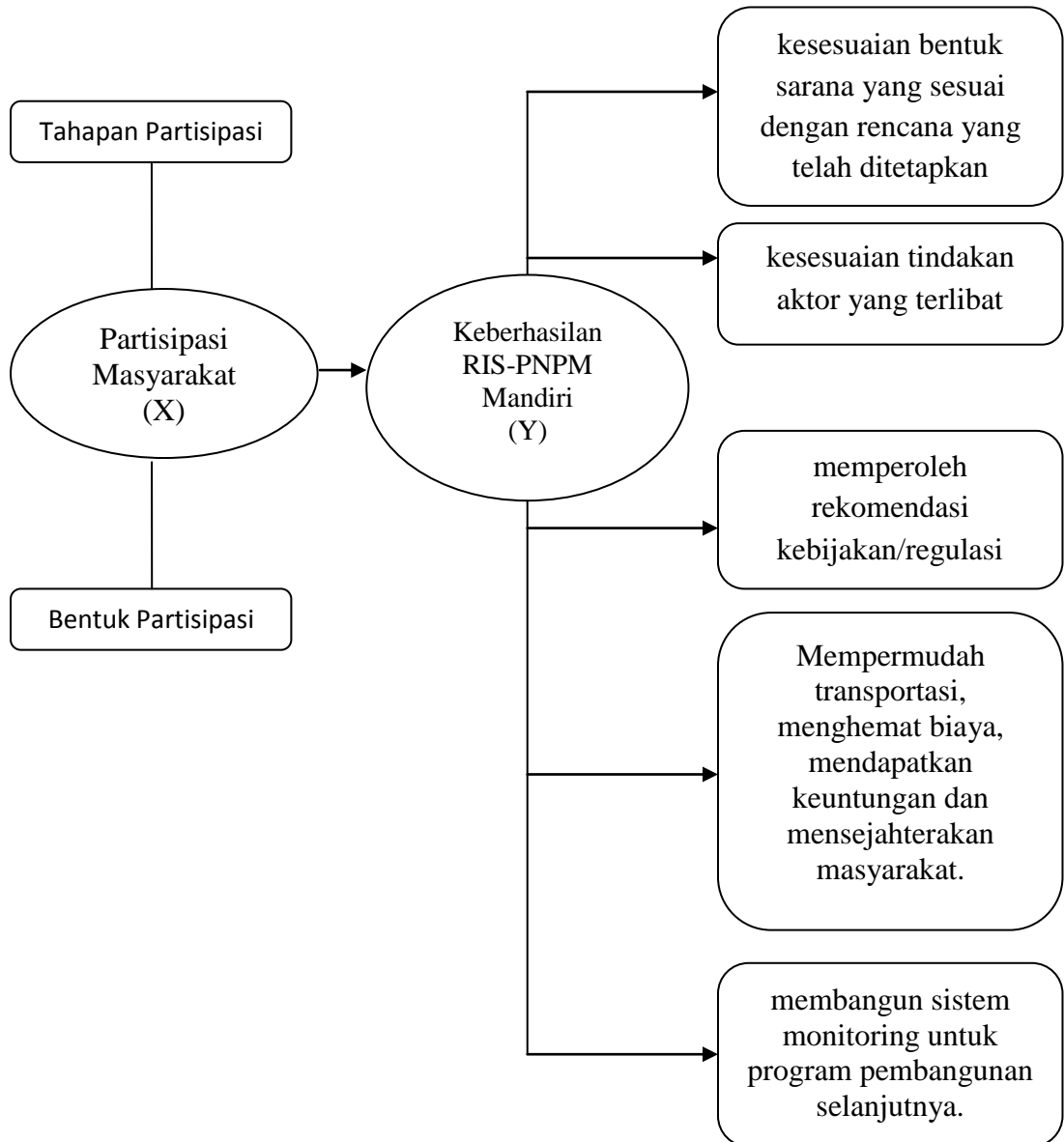
program-program di dalam hal jadwal penggunaan input/masukan data oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan. Monitoring dalam hal ini pengawasan diharapkan menjadi suatu *social control* bagi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program yang akan di jalankan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan kualitas yang ditentukan.

E. Kerangka Berpikir

Partisipasi masyarakat dilihat dari tahapan partisipasinya yang dimulai dari tahap perencanaan (Musyawarah Desa I), tahap pelaksanaan (Musyawarah Desa II), tahap menikmati hasil (Musyawarah Desa III), serta tahap monitoring dan evaluasi (Musyawarah Desa IV). Dari beberapa tahapan partisipasi, dilihat juga bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa dari yang berupa uang, tenaga, keahlian, pikiran/ide, barang atau material.

Keberhasilan RIS-PNPM dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu kesesuaian bentuk sarana yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian tindakan aktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijakan, mempermudah transportasi, menghemat biaya, mendapatkan keuntungan dan mensejahterakan masyarakat serta membangun sistem monitoring untuk program pembangunan selanjutnya.

Keterkaitan antar variabel dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap keberhasilan RIS-PNPM

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan. Hal tersebut dikarenakan jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan, belum melalui fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengujian hipotesis pada penelitian yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah:

- Hipotesis Nol (H_0)

Hipotesis yg menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Artinya, dalam rumusan hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel (X) mempengaruhi (Y).

H_0 : “tidak ada pengaruh partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program RIS-PNPM Mandiri”

- Hipotesis Kerja (H_1)

Hipotesis yg menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang diteliti. Hasil perhitungan H_1 tersebut, akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian.

H_1 : “ada pengaruh partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program RIS-PNPM Mandiri”